

Kebijakan Moneter Islam Berlandaskan Maqashid Syariah Bagi Pembangunan Berkelanjutan

Amalia Nuril Hidayati

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Haeva Zuliani

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Novelia Krisgiyanti

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Natasya Yulia Vernanda

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Ramadhani Endira Aszara

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*Email : amalianoeril@gmail.com, haevazuliani@gmail.com,
noveliakrisgiyanti2023@gmail.com, tasyayv5@gmail.com, aszaradira@gmail.com*

Abstract. In a globalized and uncertain economy, monetary policy is vital for stability and growth. However, prioritizing only prices and interest rates can result in income inequality and a disconnect between financial and real sectors. This study examines Islamic monetary policy's role in supporting sustainable development aligned with the SDGs through a literature review. Islamic monetary policy promotes fairness through principles like the prohibition of interest (riba) and equitable wealth management, utilizing tools like zakat, waqf, and qard al-hasan to foster economic development. Islamic financial instruments are crucial for achieving SDGs, such as poverty reduction and education access. Despite challenges from conventional systems, there are opportunities to advance Islamic monetary policy by enhancing institutions and innovating in finance technology. This research indicates that Islamic monetary policy promotes economic stability, social justice, and sustainable growth.

Keywords: Islamic Monetary Policy, Purpose of Shariah, Economic Stability, Shariah-Based Monetary Instruments, Sustainable Development Goals

Abstrak. Dalam globalisasi dan ketidakpastian ekonomi, kebijakan moneter penting untuk stabilitas makro dan pertumbuhan. Namun, fokus pada harga dan suku bunga menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kurangnya hubungan antara sektor moneter dan riil. Penelitian ini membahas kebijakan moneter Islam dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan sesuai SDGs, menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis literatur terkait. Kebijakan moneter Islam menawarkan pendekatan adil dengan prinsip tanpa riba dan pengelolaan kekayaan yang merata. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan qard al-hasan efektif mendorong pembangunan ekonomi yang adil. Instrumen keuangan sosial Islam berperan penting dalam mencapai SDGs, termasuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan. Meskipun ada tantangan seperti ketergantungan pada sistem konvensional, peluang pengembangan kebijakan moneter Islam terbuka lebar melalui penguatan institusi dan inovasi teknologi keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam mendukung stabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter Islam, Maqasid al-Syariah, Stabilitas Ekonomi, Instrumen Moneter Syariah, Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan ketidakpastian ekonomi, pengelolaan moneter sangat krusial untuk mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara. Perubahan terbaru dalam perekonomian global, teknologi, dan pasar keuangan menimbulkan tantangan baru bagi kebijakan moneter. Ketergantungan ekonomi yang semakin meningkat di antara negara-negara serta dampak perubahan iklim membuat pengambilan keputusan mengenai kebijakan moneter menjadi lebih rumit. Stabilitas moneter menjadi pilar penting bagi keseimbangan ekonomi. Kebijakan moneter tradisional yang berfokus pada inflasi dan suku bunga sering kali menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, perlu ada model kebijakan yang juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan.¹

Salah satu aspek krusial bagi kemajuan sebuah negara adalah kemampuan dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi. Proses ini mencakup peningkatan produktivitas serta aktivitas ekonomi, serta keterhubungan dengan pasar internasional. Semua perubahan tersebut merefleksikan kemajuan ekonomi dan memiliki tujuan untuk membangun dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan peningkatan dalam produksi barang, jasa, dan pendapatan masyarakat. Semua ini berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup.²

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Kebijakan moneter merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh bank sentral guna mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Sasaran dari kebijakan ini adalah untuk mencapai stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan semacam ini juga menekankan kepada keadilan, distribusi yang merata, serta reformasi sosial dan pembangunan ekonomi yang seimbang. Pengelolaan sistem perbankan yang sehat juga merupakan aspek penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga nilai-nilai positif.³

Instrumen yang krusial dalam kebijakan moneter terdiri dari suku bunga, operasi pasar terbuka, serta cadangan kas yang minimum. Suku bunga berpengaruh pada biaya untuk meminjam dan berinvestasi. Operasi pasar terbuka mencakup pembelian atau penjualan surat utang pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Cadangan

¹ Fajar Jafar Sodik, et al., “ Tantangan dan Peluang Kebijakan Moneter bagi Negara Berkembang di Era Globalisasi”, *Journal of Macroeconomics and Sicial Development*, Vol.1, No.3, (2024), hal. 2.

² Iren Despileny, Suzana, Nanda Suryadi, Mahyarni, “ Kebijakan Moneter dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Sharia Kompetitif*, Vol.1, No.1, (2025), hal. 21.

³ Dini Abdianti, Anisa Restu, Sholahuddin Al Ayyubi, dan Faisal Hidayat, "Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam", Trending: *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 1, No. 3, (Juli : 2023), hal. 218.

kas minimum menentukan persentase uang yang wajib disimpan oleh bank. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan inflasi dan mempertahankan nilai tukar mata uang melalui suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berpengaruh pada inflasi karena perubahan suku bunga dapat langsung memengaruhi permintaan.⁴

Ekonomi moneter merupakan subdisiplin dari ilmu ekonomi yang mempelajari faktor-faktor makroekonomi yang berdampak pada permintaan dan penawaran uang. Bidang ini mengeksplorasi peranan sistem keuangan serta semua bentuk uang dalam perekonomian suatu negara. Studi ekonomi moneter sangat signifikan karena uang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan berperan dalam mengatur aspek-aspek ekonomi. Selain itu, bidang ini juga berfungsi dalam merumuskan kebijakan makroekonomi serta menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan transaksi finansial.⁵

Kebijakan moneter ini merupakan faktor penting dalam perekonomian. Namun, perbedaan sistem ekonomi yang berlaku, akan memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter. Sistem ekonomi konvensional memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter dengan sistem ekonomi Islam.⁶

Peran Kebijakan Moneter dalam Perekonomian

Kebijakan moneter merupakan alat yang krusial untuk mengendalikan inflasi serta mempertahankan stabilitas ekonomi. Inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti inflasi dasar, permintaan dalam negeri, nilai tukar, dan langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam mengelola ekspektasi masyarakat. Bank Indonesia memanfaatkan kebijakan ini untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan aktivitas perbankan, yang semuanya mempengaruhi permintaan serta stabilitas ekonomi. Implementasi kebijakan moneter di negara yang sedang berkembang lebih kompleks karena ada tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan uang beredar untuk mendukung pembangunan. Keterbatasan modal kerap memaksa pemerintah untuk melakukan pinjaman kepada bank sentral, yang dapat memicu inflasi. Di sisi lain, bank sentral juga perlu dengan cermat memonitor sektor luar negeri agar ekonomi tetap stabil. Kebijakan moneter di negara berkembang memerlukan tingkat disiplin dan pengawasan yang lebih ketat.⁷

Kontribusi Kebijakan Moneter Islam dalam Mendukung Tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

SDGs berfokus pada pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, kesejahteraan sosial, serta keberlanjutan lingkungan. Salah satu sasaran utamanya adalah menghilangkan kemiskinan, yang selaras dengan tujuan keuangan Islam. Instrumen seperti zakat berfungsi mendistribusikan kekayaan dari orang mampu kepada yang

⁴ Ifan Mujiadi, Arya Al-Fitra Asyhari, Ahmad Ghondur, "Peran Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi : Studi Kepustakaan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.3, No.1, (Januari : 2025), hal. 184.

⁵ Fitrian Aprilianto, *EKONOMI MONETER : Teori Pengantar*, (Malang : UMMPress, 24 Desember 2024), hal.2

⁶ Devah Sukmawati et al., "Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.2, No.6, (Juni : 2024), hal. 2.

⁷ Edi Irawan, "Peran Kebijakan Moneter Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur," *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 4 (November: 2023). hal. 262- 263.

membutuhkan sehingga membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan. Secara keseluruhan, keuangan Islam mendukung pencapaian SDGs melalui penerapan prinsip keadilan sosial, inklusi keuangan, stabilitas ekonomi, dan perlindungan lingkungan, sehingga berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan.⁸

Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Moneter Islam di Era Ekonomi Modern

Penerapan kebijakan keuangan Islam menghadapi berbagai tantangan. Banyak negara yang mayoritas penduduknya Muslim menggunakan sistem keuangan ganda, sehingga instrumen-instrumen syariah seperti qardhul hasan dan sukuk dari bank sentral belum dapat sepenuhnya menggantikan suku bunga konvensional. Pasar uang syariah pun masih kurang berkembang dan terbatas, yang membuat kebijakan moneter Islam menjadi lebih sulit untuk diadaptasi. Di samping itu, terdapat perbedaan dalam standar dan fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga, yang menghalangi integrasi pasar keuangan Islam secara global. Tantangan lainnya ialah kurangnya ahli di bidang keuangan Islam dan ekonomi syariah, serta ketertinggalan sektor keuangan syariah dalam hal teknologi seperti *fintech*, *blockchain*, dan mata uang digital. Seluruh faktor tersebut mengakibatkan pengembangan kebijakan moneter Islam tidak berjalan dengan maksimal.

Peluang Penerapan

- a. Integrasi Prinsip Maqashid Syariah dan SDGs
- b. Kebijakan moneter Islam berpotensi besar mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), dengan fokus pada keadilan sosial, pemerataan, dan keseimbangan ekonomi.
- c. Potensi Pasar Keuangan Islam Global yang Terus Tumbuh
- d. Pertumbuhan industri sukuk, reksa dana syariah, dan green sukuk menunjukkan meningkatnya permintaan instrumen halal yang etis dan ramah lingkungan.
- e. Inovasi Teknologi Finansial Syariah (*Islamic Fintech*)
- f. Teknologi digital membuka peluang besar untuk memperluas akses keuangan syariah, meningkatkan efisiensi, dan memperluas inklusi keuangan umat Muslim global.
- g. Dukungan Regulasi dan Lembaga Internasional
- h. Lembaga seperti AAOIFI, IFSB, dan Bank Pembangunan Islam (IsDB) semakin aktif mengembangkan standar global kebijakan moneter dan keuangan Islam, memperkuat kredibilitas sistem ini.
- i. Peluang Kolaborasi dengan Sistem Konvensional.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian berbasis keperpustakaan. Library research (studi kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber relevan yang membahas kebijakan moneter Islam serta penerapannya dalam

⁸ Annisa Maulidia Alfian, dkk., "Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mencapai Sustainable Development Goals", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2025, hal. 516- 519.

⁹ Solikin M.Juhro, Ferry Syarifuddin, Ali Sakti, *Inclusive Welfare : On the Role of Islamic Social- Public Finance and Monetary Economics*, (Jakarta: Springer , 30 October 2024) , hal. 27.

pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini berfokus pada analisis konsep, prinsip, serta implementasi kebijakan moneter berbasis Maqasid al-Syariah yang mendorong keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai peran sistem moneter Islam dalam mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi. Melalui analisis terhadap literatur, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan moneter Islam yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Kebijakan Moneter Dalam Islam

Kebijakan moneter adalah cara untuk mengendalikan jumlah uang yang ada di suatu negara demi mencapai beberapa sasaran, seperti menekan inflasi serta deflasi, mencapai pengeraan yang optimal, atau meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan ini dapat menentukan tingkat suku bunga pinjaman, persyaratan margin, modal untuk bank, atau bahkan berfungsi sebagai lembaga peminjam terakhir, serta bernegosiasi dengan negara lain. Selain itu, kebijakan moneter juga bisa dipahami sebagai usaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan sambil tetap menstabilkan harga. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Otoritas Moneter berusaha menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang yang tersedia agar inflasi tetap terjaga, kesempatan kerja maksimal tercapai, dan distribusi barang berjalan lancar.

Kebijakan moneter terdiri dari dua yaitu: (1) Kebijakan ekspansif, adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*), (2) Kebijakan kontraktif, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*).¹⁰

Kebijakan moneter Islam adalah langkah yang diambil oleh bank sentral untuk memengaruhi ekonomi melalui pengaturan jumlah uang yang beredar serta tingkat bunga, dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip ketentuan Islam. Oleh karena itu, sasaran dari kebijakan moneter Islam meliputi: Mencapai kesejahteraan ekonomi dengan terciptanya lapangan kerja yang maksimal, dan hal ini sejalan dengan tujuan Islam dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan Makmur. Menjaga stabilitas harga, Menciptakan keadilan serta pemerataan dalam ekonomi, Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Pertumbuhan ekonomi yang pesat sangat penting untuk menciptakan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter islam dan

¹⁰ Syaparuddin, *Referensi Ekonomi Islam : Islam dan Moneter*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, April 2023), hal. 181-182.

kebijakan moneter konvensional tidak berbeda yaitu untuk menjaga agar mata uang stabil sehingga akan menumbuhkan tercapainya ekonomi yang merata melalui instrument kebijakan yang digunakan. Perbedaan yang mendasar pada kebijakan moneter islam adalah prinsip syariah. Dalam prinsip ini tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai uang maupun suku bunga.¹¹

Prinsip-Prinsip Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

Secara khusus kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi. Kemudian mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki.

Kebijakan moneter dalam islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang *absolut*.
2. Manusia merupakan pemimpin (*kholifah*) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
5. Kekayaan harus diputar.
6. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan.
7. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.¹²

Dalam aspek teknis, kebijakan moneter islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis moneter dalam islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Islam

Instrument atau alat kebijakan moneter yang dikenal dalam ekonomi Islam antara lain dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran pembiayaan dan instrumen yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Instrumen besar pertama (kontrol kuantitatif penyaluran pembiayaan) didukung dengan instrumen moneter berupa:

1. *Statutory Reserve Requirement* (Cadangan Wajib Minimum)

Dalam ekonomi Islam, instrumen seperti discount rate dan open market operation tidak diterapkan. Sebagai alternatif, bank konvensional diwajibkan menempatkan

¹¹ Neha Hasallyt, "Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal of Islamic Economics and Social*, Vol. 2, No. 1, (April : 2024), hal. 107.

¹² Devah Sukmawati, dkk., "Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 6, (Juni : 2024), hal. 6-7.

sebagian dana dari demand deposits sebagai cadangan wajib di bank sentral untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kompetitivitas.

2. *Financing Ceiling Selain Reserve requirement*

Manajemen moneter yang berhasil memerlukan sistem penyaluran pembiayaan yang efektif agar sesuai target. Minimal 90% dana pembiayaan harus dialokasikan pada sektor prioritas untuk memastikan konsistensi dengan target moneter..

3. *Government Deposits*

Bank sentral memiliki kewenangan untuk memindahkan demand deposit pemerintah antara bank sentral dan bank komersial. Instrumen ini efektif dalam memengaruhi cadangan bank komersial secara langsung, serupa dengan fungsi open market operation pada sistem konvensional.

4. *Common Pool*

Common pool adalah instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial menyisihkan sebagian dari deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas.

5. *Moral Suasion*

Dalam prinsip syariah, bank sentral dapat menggunakan kontak personal, konsultasi, dan pertemuan dengan bank komersial untuk memantau kondisi dan masalah yang dihadapi. Pendekatan ini memungkinkan bank sentral memberikan solusi yang cepat dan tepat bagi perbankan secara umum..

6. *Equity base – instrument*

Salah satu instrumen yang dapat dipergunakan untuk *open market operation* (OMO) adalah instrumen yang berbasis penyertaan. Ada beberapa alasan pengajuran instrumen ini.

7. Perubahan tingkat loss & *profit sharing ratio*

Dalam mekanisme mudharabah, disarankan adanya variasi rasio bagi hasil antara bank sentral, bank komersial, deposan, dan wirausahawan. Hal ini penting karena keuntungan dari aktivitas mudharabah bersifat fluktuatif, sehingga rasio bagi hasil dan pembagian risiko disesuaikan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh..¹³

Instrumen besar kedua adalah merealisasikan tujuan sosio ekonomi antara lain melalui instrumen berikut ini:

a. *Treating The Created Money as Fai'*

Treating The Created Money as Fai', yaitu pemanfaatan keuntungan seigniorage dari penciptaan uang oleh bank sentral. Keuntungan tersebut selayaknya dialokasikan sebagai fai' untuk mendanai program sosial dan proyek yang mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin serta mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan.

b. *Goal Oriented Allocation Of Credit*

Pembiayaan perbankan seharusnya mendukung seluruh pelaku usaha untuk pemerataan ekonomi, namun bank umum lebih memilih pengusaha besar karena dianggap berisiko rendah. Akibatnya, usaha kecil sulit memperoleh pembiayaan karena risiko tinggi dan persyaratan yang berat. Hal ini menghambat kontribusi penting usaha

¹³ Muhammad Taufiq Abadi, *Ekonomi Moneter Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Zahir Publishing, Juli 2022), hal. 81-84.

kecil dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan memperbaiki distribusi pendapatan.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan skim penjaminan pembiayaan berbasis prinsip Islam untuk mempermudah akses usaha produktif tanpa persyaratan jaminan. Dalam mekanisme ini, risiko kegagalan usaha dibedakan: jika disebabkan penyimpangan moral, bank dapat memperoleh kembali dana; sedangkan jika akibat kondisi ekonomi buruk, bank ikut menanggung risikonya.¹⁴

Peran Kebijakan Moneter Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Kebijakan moneter memiliki peran penting dan kompleks dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk dalam perspektif ekonomi syariah. Melalui instrumen seperti pengendalian inflasi, pengelolaan likuiditas, dan kebijakan terhadap biaya pinjaman serta nilai tukar, bank sentral berupaya menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, pengaturan moneter difokuskan agar uang berfungsi sebagai alat untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Stabilitas nilai mata uang menjadi tujuan utama kebijakan moneter, baik dalam menghadapi faktor internal maupun eksternal. Untuk mencapainya, diperlukan pemerataan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penurunan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi riil, dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam konteks perbankan syariah dan dukungan bagi UMKM, kebijakan moneter merupakan langkah-langkah Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan mata uang sebagai dasar pembangunan ekonomi yang lebih baik.¹⁵

Dalam ekonomi syariah, kebijakan moneter harus selaras dengan prinsip yang menolak riba dan mendorong distribusi pendapatan yang adil. Kebijakan ini berperan menjaga stabilitas makroekonomi sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Melalui pengendalian inflasi dan pengaturan instrumen moneter, kestabilan harga dapat dipertahankan sehingga investasi jangka panjang lebih terjamin. Stabilitas harga memiliki nilai penting dalam syariah karena berkaitan dengan keadilan dan keseimbangan. Kebijakan moneter ekspansif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil. Dalam ekonomi syariah, kebijakan ini juga berperan dalam menciptakan distribusi pendapatan yang adil sesuai prinsip keadilan. Selain menjaga stabilitas harga, kebijakan moneter mendukung investasi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, sehingga menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai tujuan pembangunan dalam perspektif syariah.

Kontribusi Instrumen Keuangan Sosial Islam Terhadap Pilar SDGs

Instrumen keuangan sosial dalam Islam seperti zakat, wakaf, dan qard al-hasan memiliki posisi yang sangat penting untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena berlandaskan prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan. Zakat berfungsi untuk mengalihkan kekayaan demi mengatasi isu kemiskinan, wakaf

¹⁴ Mugiyati, "Instrumen Kebijakan Moneter (Analisis Managemen Moneter Islami)", *Al Qanun*, Vol. 11, No. 2, (Desember : 2008), hal. 432-433.

¹⁵ Fika Rasidah dan Naim, "Analisis Peran Kebijakan Moneter dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Pendidikan (JAMED)*, Vol. 1, No. 1, (Januari: 2025), hlm. 68-70.

menyediakan bantuan untuk pembangunan infrastruktur sosial yang berkelanjutan, sementara pembiayaan mikro Islam memperluas akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Jadi, instrumen-instrumen ini berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat perkembangan yang inklusif sesuai dengan tujuan SDGs.

Untuk mengoptimalkan peran instrumen keuangan sosial Islam dalam mencapai SDGs, sangat penting untuk meningkatkan nilai-nilai etika Islam dan pemahaman mengenai keuangan syariah sehingga masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi. Saat ini, efektivitas zakat, wakaf, dan qard al-hasan masih terkendala oleh berbagai peraturan dan kurangnya integrasi dalam sistem pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan dalam lembaga dan manajemen yang lebih baik agar instrumen tersebut dapat berfungsi dengan lebih efektif dan berkelanjutan.¹⁶

Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Kebijakan Moneter

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, kebijakan moneter di Indonesia menghadapi tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, serta perubahan harga komoditas yang memengaruhi stabilitas ekonomi. Ketergantungan pada ekspor komoditas dan persaingan global menuntut peningkatan daya saing produk domestik. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus adaptif dan didukung sinergi kebijakan fiskal serta reformasi struktural untuk memperkuat produktivitas dan inovasi.

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi contoh pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan komitmen global terhadap SDGs dan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kebijakan ekonomi. Perubahan paradigma menuju ekonomi hijau menjadi kunci utama. Namun, implementasi kebijakan moneter yang mendukung keberlanjutan masih menghadapi tantangan internal, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan dan kelemahan institusi. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor keuangan, dan lembaga internasional diperlukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bank Indonesia perlu menerapkan kebijakan moneter yang tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui pendekatan holistik dan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Meskipun tantangan masih ada, peluang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tetap besar melalui reformasi kebijakan, peningkatan daya saing, dan komitmen pada prinsip keberlanjutan.¹⁷

KESIMPULAN

Kebijakan moneter Islam menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kemaslahatan dibandingkan sistem moneter konvensional. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, distribusi kekayaan yang adil, serta keterkaitan yang

¹⁶ Kartina, dkk., "Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Tinjauan Literatur Komprehensif", *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)*, Vol. 1, No. 4, (Mei : 2025), hal. 359-360.

¹⁷ Alwi Rifa'i, dkk., "Analisis Kebijakan Moneter Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 5, No. 1 (Maret : 2025), hal. 183-184.

kuat antara sektor moneter dan sektor riil memberikan landasan kokoh untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam maupun keuangan sosial Islam juga berperan signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat inklusi sosial.

Namun, implementasi kebijakan moneter Islam masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketergantungan pada sistem keuangan konvensional, minimnya standardisasi regulasi, kurangnya inovasi teknologi, serta terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang moneter syariah. Meski demikian, peluang pengembangannya tetap besar seiring meningkatnya pertumbuhan pasar keuangan syariah global, dukungan lembaga internasional, dan berkembangnya teknologi *finansial syariah*.

Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mengintegrasikan maqasid al-syariah dalam perumusan kebijakan makroekonomi, kebijakan moneter Islam dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan kebijakan moneter Islam bukan hanya alternatif, tetapi merupakan kebutuhan strategis dalam membangun ekonomi modern yang berkeadilan dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi moneter: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(3), 218. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1140>
- Alfian, A. M., et al. (2025). Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mencapai Sustainable Development Goals. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), hlm. 516- 519 <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/25106/8974/66528>
- Aprilianto, F. (2024, 24 Desember). *Ekonomi moneter: Teori pengantar*. Malang: UMM Press. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=fyI6EQAAQBAJ>
- Despileny, I., Suzana, S., Suryadi, N., & Mahyarni, M. (2025). Kebijakan moneter dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Sharia Kompetitif*, 1(1), 21. <https://ejournal.kompetitif.com/index.php/sharia/article/view/1976>
- Hasallyt, N. (2024). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Social*, 2(1), 107. <https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/ejesh/article/view/4236/1903>
- Irawan, E. (2023). Peran Kebijakan Moneter Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(4), hlm. 262- 263. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i4.1899>

Juhro, S. M., Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2024). *Inclusive welfare: On the role of Islamic social-public finance and monetary economics*. Jakarta: Springer. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-0051-9_12#DOI

Kartina, et al. (2025). Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Tinjauan Literatur Komprehensif. *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaf)*, 1(4), 359–360. <https://www.researchgate.net/publication/392481210> PERAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SDGS TINJAUAN LITERATUR KOMPREHENSIF

Mugiyati. (2008). Instrumen Kebijakan Moneter (Analisis Manajemen Moneter Islami). *Al Qanun*, 11(2), 432–433. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/download/128/113>

Mujiadi, I., Al-Fitra Asyhari, A., & Ghondur, A. (2025, Januari). Peran kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi: Studi kepustakaan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 184. <https://journal.areai.or.id/index.php/Moneter/article/view/1120/1440>

Rasidah, F., & Naim. (2025). Analisis Peran Kebijakan Moneter Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Pendidikan (JAMED)*, 1(1), 68–70. <https://journal.yapakama.com/index.php/JAMED/article/view/175/121>

Rifa'i, A., et al. (2025). Analisis Kebijakan Moneter Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 5(1), 183–184. <https://journal.sinov.id/index.php/sinoveka/article/download/884/788/2561>

Sodik, F. J., et al. (2024). Tantangan dan peluang kebijakan moneter bagi negara berkembang di era globalisasi. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 2. <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd/article/view/198>

Sukmawati, D., Komariyah, N., Fitriati, A., & Asshiddiqi, U. G. (2024). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6), hlm. 2-7. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/402>

Syaparuddin. (2023). *Ekonomi Islam: Islam dan Moneter*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing.